

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dewasa ini, tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik semakin meningkat. Sehingga, pemerintah pusat dan pemerintah daerah terdorong untuk menerapkan akuntabilitas publik. Salah satu bentuk pertanggung jawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi yang berisi informasi keuangan yang digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan baik internal maupun eksternal (Mahsun, Sulistiyowati dan Purwanugraha, 2011:115). Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara atau daerah selama suatu periode. Laporan keuangan yang dihasilkan digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan bentuk laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun

anggaran, laporan keuangan tersebut terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Oleh sebab itu, informasi yang terdapat dalam LKPD harus bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan para pemakai. Informasi akan bermanfaat apabila informasi tersebut memiliki nilai. Nilai tersebut diantaranya adalah Kualitas.

Pelaporan keuangan yang berkualitas adalah pelaporan keuangan yang memenuhi tujuan dari pelaporan tersebut. Oleh karena itu, Laporan keuangan pemerintah dikatakan berkualitas apabila laporan keuangan memenuhi keempat karakteristik kualitatif yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami, sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Hal ini merupakan prasyarat normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Kualitas laporan keuangan akan meningkatkan kualitas informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Para pengguna laporan keuangan yakin dalam mengambil keputusan karena didasarkan pada informasi yang telah dipersiapkan dengan baik, disetujui, dan diaudit secara transparan, dapat dipertanggungjawabkan dan berkualitas. Kualitas laporan keuangan adalah sejauh mana laporan keuangan menyajikan informasi yang benar dan jujur. Hal ini berarti bahwa kualitas laporan keuangan menunjukkan konsep kualitas informasi dari laporan tersebut.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 disebutkan bahwa keterandalan laporan keuangan akan terpenuhi jika informasi dalam laporan keuangan tersebut bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, dapat dikatakan juga jika informasi dalam laporan keuangan tersebut

menyajikan setiap fakta secara jujur serta dapat diverifikasi. Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan bisa saja relevan, tetapi jika dalam penyajiannya tidak dapat diandalkan maka pengguna informasi tersebut bisa saja tidak akan mempercayai informasi yang disajikan tersebut. Beberapa hal seperti inilah yang akhirnya menyebabkan keterandalan dari laporan keuangan menjadi sangat penting karena merupakan syarat karakteristik dari pelaporan keuangan agar dapat dikatakan memenuhi kualitas yang ditentukan perundang-undangan. Selain itu juga laporan keuangan daerah yang andal akan dapat dipercaya oleh penggunanya dalam hal ini kaitannya dengan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Proses Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah dilakukan dengan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan yang sudah ditetapkan. Setelah disesuaikan dengan SAP, selanjutnya Laporan Keuangan Daerah harus diaudit dan dalam hal ini diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Laporan keuangan diaudit untuk memeriksa salah satunya apakah laporan keuangan sudah disajikan sesuai dengan standar yang ditetapkan, juga apakah laporan keuangan sudah memenuhi kriteria-kriteria yang ada seperti yang ditetapkan perundang-undangan yakni, laporan keuangan harus relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

BPK setiap tahun memberikan penilaian opini atas laporan keuangan Pemerintah Daerah yang telah diaudit. Laporan keuangan yang berkualitas dilihat dari opini yang diberikan BPK. Ketika BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap LKPD, artinya dapat dikatakan bahwa laporan keuangan suatu entitas pemerintah daerah tersebut disajikan dan diungkapkan

secara wajar dan berkualitas. Terdapat empat opini yang diberikan pemeriksa yaitu opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), opini Tidak Wajar (TW), dan Pernyataan Menolak memberi opini atau Tidak Memberi Pendapat (TMP).

Berdasarkan hasil audit BPK dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Kabupaten Flores Timur mendapat opini WDP secara berturut-turut dari tahun 2016-2020 (*Sumber: Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD*). Hal ini dikarenakan masih terdapat kelemahan pengendalian internal yang signifikan atas proses penatausahaan dan penyajian aset tetap yaitu inventarisasi belum dilakukan menyeluruh. Pemerintah Kabupaten Flores Timur juga belum menyelesaikan tindak lanjut atas pertanggungjawaban pengeluaran TA 2004 dan 2005 yang tidak diakui sebesar Rp.804.605.312,00 dan sisa UUDP TA 2004, 2005 dan 2006 yang belum disetor sebesar Rp.1.788.084.593,76. Selain itu terdapat aset lain-lain berupa sisa uang persediaan TA 2015 dan 2016 sebesar Rp.140.859.000,00 dan Rp.100.137.480,00, serta pajak PPN/PPH sebesar Rp.6.347.449,00 dan pajak restoran sebesar Rp.38.788.500,00 yang belum dapat dipertanggungjawabkan oleh bendahara pengeluaran.

Beberapa permasalahan yang terjadi di Kabupaten Flores Timur di atas membuktikan bahwa masih lemahnya kompetensi SDM dan sistem pengendalian internal pada organisasi pemerintahan saat ini. Lemahnya kemampuan SDM tidak hanya diakibatkan oleh kelemahan pengelolaan keuangan daerah sektor administrasi dan akibat keterbatasan dukungan sumber daya manusia saja, akan tetapi juga ada kelemahan lain yaitu kepatuhan terhadap peraturan, prosedur serta

perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah, termasuk penyajian transaksi dan laporan keuangan yang jujur agar informasi yang dihasilkan laporan keuangan tidak hanya dapat dipahami dan dimengerti oleh pemakai, namun juga bermanfaat dan dapat dipercaya oleh pemakai itu sendiri.

Penyusunan Laporan Keuangan yang berkualitas membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dan memahami aturan penyusunan laporan keuangan dengan SAP. Menurut Ihsanti (2014) kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan untuk melaksanakan fungsi-fungsi untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Sumber daya manusia merupakan faktor penting demi terciptanya laporan keuangan yang berkualitas. Dalam hal ini adanya kompetensi sumber daya manusia mendasari seseorang mencapai kinerja yang tinggi dalam pekerjaannya memiliki peranan yang sangat penting untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan entitas yang bersangkutan (Wati dkk, 2014).

Penelitian mengenai sumber daya manusia yang pernah dilakukan oleh Riandani Riedy (2017), dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian lain yang dilakukan oleh Pane Hotner (2020), dalam penelitiannya menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Akan tetapi, hasil penelitian berbeda ditunjukkan oleh Ariyani Zulia (2018), yang menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Faktor kedua yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah Penerapan Sistem Pengendalian Internal. Pengendalian internal terdiri atas kebijakan dan prosedur yang digunakan dalam mencapai sasaran dan menjamin atau menyediakan informasi keuangan yang andal, tujuan pengendalian internal berkaitan dengan keandalan laporan keuangan, umpan balik yang tepat waktu terhadap pencapaian tujuan-tujuan operasional dan strategis, serta kepatuhan pada hukum dan regulasi.

Penelitian mengenai penerapan sistem pengendalian internal yang pernah dilakukan oleh Dama Bobi (2021) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Penelitian lain yang dilakukan oleh Riandani Riedy (2017), dalam penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Akan tetapi, hasil penelitian berbeda ditunjukkan oleh Listiani Tri (2018), menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Flores timur menyajikan saldo kas di bendahara BOS per 31 desember 2020 senilai Rp.4.613.889.672,81. Nilai tersebut belum dapat diyakini karena belum sesuai kondisi riil. Terdapat sisa kas di bendahara BOS berupa SPJ yang tidak diakomodir dalam Surat Pengesahan Belanja (SPB) minimal senilai Rp.1.179.964.120,00. Hal ini tidak sesuai dengan definisi kas dalam Standar Akuntansi Pemerintahan di mana kas adalah uang tunai

dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan (*Sumber: Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD*).

Faktor ketiga yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah Penerapan Standar Akuntansi pemerintahan (SAP). SAP dalam peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. SAP mewajibkan setiap entitas pelaporan termasuk pemerintah daerah melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi, keseimbangan antara generasi dan evaluasi kinerja. Tidak adanya standar akuntansi yang memadai akan menimbulkan implikasi negatif berupa rendahnya reliabilitas dan objektivitas informasi yang disajikan, inkonsistensi dalam pelaporan keuangan serta menyulitkan dalam pengauditan.

Penelitian mengenai penerapan standar akuntansi pemerintahan yang pernah dilakukan oleh Munira Hari (2021), dalam penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Penelitian lain yang dilakukan oleh AriyaniZulia (2018), dalam penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi memiliki berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Akan tetapi, hasil penelitian berbeda ditunjukkan oleh Sasana Hadi, dkk (2021), yang menunjukkan bahwa implementasi standar akuntansi pemerintahan tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan latar belakang yang ada, dapat dikatakan bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Flores Timur belum berkualitas. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengangkat judul **“Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari uraian diatas maka penulis dapat merumuskan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apakah kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian internal pemerintah dan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh parsial terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur?
2. Apakah kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian internal pemerintah dan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh simultan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian internal pemerintah dan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh parsial terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur.



2. Untuk mengetahui kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian internal pemerintah dan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh simultan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Manfaat akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, wawasan dan referensi teori yang diperoleh dalam mengembangkan ilmu akuntansi keuangan daerah, serta penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti yang melaksanakan penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini dapat diharapkan memberikan masukan dan sumbangan informasi sebagai bahan pertimbangan mengenai kualitas laporan keuangan sehingga pemerintah daerah Kabupaten Flores Timur dapat mengambil sebuah keputusan yang tepat dalam penyusunan laporan keuangan.